



# DOKUMEN POHON KINERJA DAN CASCADING KINERJA DPMPTSP KOTA PEMATANGSIANTAR PERIODE 2025-2029



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, atas tersusunnya dokumen **Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar Periode 2025–2029**. Dokumen ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung visi Wali Kota: **"Membangun Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras."**

Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui pendekatan *Logic Model*, dokumen ini memetakan hubungan sebab-akibat antara visi strategis, program, kegiatan, hingga indikator kinerja individu secara sistematis dan terukur.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi pohon kinerja ini tidak hanya bergantung pada internal DPMPTSP, tetapi juga pada sinergi lintas sektor bersama OPD mitra, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, dokumen ini disusun sebagai instrumen manajerial yang dinamis, adaptif, dan berorientasi hasil (*result-oriented*), guna memastikan bahwa setiap investasi dan pelayanan publik benar-benar memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan Pematangsiantar sebagai pusat ekonomi regional yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Pematangsiantar, 24 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR,



**MUHAMMAD HAMMAM SHOLEH, AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730228 199402 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel dan Gambar .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II. GAMBARAN STRATEGIS DPMPTSP .....</b>	<b>3</b>
2.1. Visi dan Misi Kota Pematangsiantar .....	3
2.2. Tugas dan Fungsi DPMPTSP.....	3
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP 2025-2029 .....	3
2.4. Isu-isu Strategis .....	3
<b>BAB III. ARSITEKTUR DAN POHON KINERJA .....</b>	<b>5</b>
3.1. Metodologi Penyusunan (Logic Model) .....	5
3.2. Visualisasi Pohon Kinerja DPMPTSP .....	5
3.3. Analisis Alur Logika Strategis .....	7
3.4. Penjenjangan Kinerja (Cascading).....	7
<b>BAB IV. MATRIKS CASCADING DAN TARGET .....</b>	<b>8</b>
4.1. Penjenjangan Kinerja (Cascading) 2025-2029.....	8
4.2. Matriks Target Kinerja Lima Tahunan .....	8
4.3. Matriks Penjenjangan Kinerja Individu (Level Staf/Pelaksana).....	10
4.4. Analisis Lintas Sektor (Cross-Cutting).....	10
4.5. Strategi Pencapaian Target 5 Tahunan.....	10
<b>BAB V. MANUAL INDIKATOR KINERJA .....</b>	<b>11</b>
5.1. Maksud dan Tujuan Manual Indikator.....	11
5.2. Defenisi Operasional dan Formula Penghitungan.....	11
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
6.1. Kesimpulan .....	13
6.2. Harapan dan Komitmen.....	13

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 3.1. Pohon Kinerja (Performance Tree) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar Periode 2025-2029.....	6
Tabel 4.1. Matriks Pohon Kinerja & Cascading DPMPTSP Kota Pematangsiantar.....	9
Tabel 4.2. Matriks Indikator Kinerja Individu (IKI) Pelaksana – DPMPTSP.....	10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi diwajibkan menyelaraskan sasaran strategis hingga ke level individu. Memasuki periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam mewujudkan visi Wali Kota, yaitu **"Membangun Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras."**

Pencapaian visi tersebut dijabarkan melalui misi penguatan ekonomi masyarakat yang inklusif. Dalam konteks ini, DPMPTSP memiliki tanggung jawab strategis untuk mentransformasi Pematangsiantar menjadi **Pusat Ekonomi Regional Wilayah Tengah Provinsi Sumatera Utara**. Untuk memastikan setiap program dan kegiatan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan sebuah **Pohon Kinerja (Performance Tree)** yang memetakan hubungan sebab-akibat (*logic model*) secara komprehensif.

Pohon Kinerja ini bukan sekadar alat visual, melainkan instrumen manajerial untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan pelayanan publik yang diberikan memenuhi standar ekspektasi masyarakat. Dengan penjabaran kinerja yang logis dan terukur, setiap aparatur di lingkungan DPMPTSP dapat memahami kontribusi spesifik mereka terhadap tujuan besar organisasi.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

**Maksud** dari penyusunan Dokumen Pohon Kinerja dan Cascading ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja logis yang menyelaraskan sasaran strategis organisasi dari tingkat Kepala Daerah hingga ke tingkat pelaksana (staf).

**Tujuan** spesifik dari dokumen ini adalah:

1. **Penyelarasan Strategis (Alignment):** Memastikan seluruh unit kerja dan individu bergerak ke arah yang sama sesuai target Renstra 2025-2029.
2. **Akuntabilitas Kinerja:** Menetapkan indikator kinerja yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi.

3. **Efisiensi Anggaran:** Menjamin prinsip *money follows program* berjalan optimal, di mana alokasi anggaran hanya diberikan pada kegiatan yang terbukti mendukung sasaran strategis.
4. **Optimalisasi SAKIP:** Memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan DPMPSTSP Kota Pematangsiantar.

### 1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Pohon Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN:** Menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
- **BAB II GAMBARAN STRATEGIS DPMPSTSP:** Menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta isu-isu strategis DPMPSTSP periode 2025-2029.
- **BAB III ARSITEKTUR DAN POHON KINERJA:** Menyajikan visualisasi bagan pohon kinerja dan analisis alur logika sebab-akibat antar jenjang jabatan.
- **BAB IV MATRIKS CASCADING DAN TARGET:** Memuat matriks penjenjangan kinerja beserta target capaian tahunan 2025-2029 dan analisis peran lintas sektor (*cross-cutting*).
- **BAB V MANUAL INDIKATOR KINERJA:** Berisi definisi operasional, cara penghitungan, dan sumber data setiap indikator kinerja.
- **BAB VI PENUTUP.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN STRATEGIS DPMPTSP**

#### **2.1. Visi dan Misi Kota Pematangsiantar**

Sebagai perangkat daerah, seluruh rencana strategis DPMPTSP merupakan penjabaran langsung dari arah pembangunan daerah. Adapun Visi dan Misi Kota Pematangsiantar periode 2025-2029 adalah:

- **Visi:** "Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras."
- **Misi terkait:** Khususnya pada Misi ke-3, yaitu "**Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat yang inklusif,**" di mana DPMPTSP berperan sebagai motor penggerak melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

#### **2.2. Tugas dan Fungsi DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi utama dinas meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
2. Koordinasi dan pelaksanaan promosi serta kerjasama investasi;
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu;
4. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.

#### **2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP 2025-2029**

Berdasarkan analisis mandat dan potensi daerah, DPMPTSP menetapkan kerangka tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

##### **Tujuan:**

"Terwujudnya Pertumbuhan Perkotaan Sebagai Pusat Ekonomi Regional wilayah Tengah Provinsi Sumatera Utara."

##### **Sasaran Strategis:**

1. **Meningkatnya Laju Investasi:** Berfokus pada kuantitas dan kualitas modal yang masuk untuk menciptakan lapangan kerja dan kemitraan dengan UMKM.
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah:** Berfokus pada transformasi digital, efisiensi birokrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), serta akuntabilitas internal organisasi.

#### **2.4. Isu-Isu Strategis**

Dalam kurun waktu 2025-2029, terdapat beberapa tantangan utama yang menjadi fokus pembenahan dalam Pohon Kinerja DPMPTSP:

1. **Optimalisasi Sistem OSS-RBA:** Perlunya sinkronisasi berkelanjutan antara sistem pusat dan validasi teknis di daerah agar proses izin tidak terhambat.
2. **Ketersediaan Data Investasi (IPRO):** Kebutuhan akan dokumen profil peluang investasi yang matang (*Ready to Offer*) untuk menarik minat investor skala nasional maupun internasional.
3. **Integrasi Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP):** Memperkuat sinergi dengan instansi vertikal dan OPD teknis agar MPP Pematangsiantar menjadi pusat solusi bagi masyarakat.
4. **Kemitraan Investasi:** Mendorong investor besar agar berkolaborasi dengan pelaku usaha lokal/UMKM guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sesuai misi Wali Kota.

## BAB III

### ARSITEKTUR DAN POHON KINERJA

#### 3.1. Metodologi Penyusunan (Logic Model)

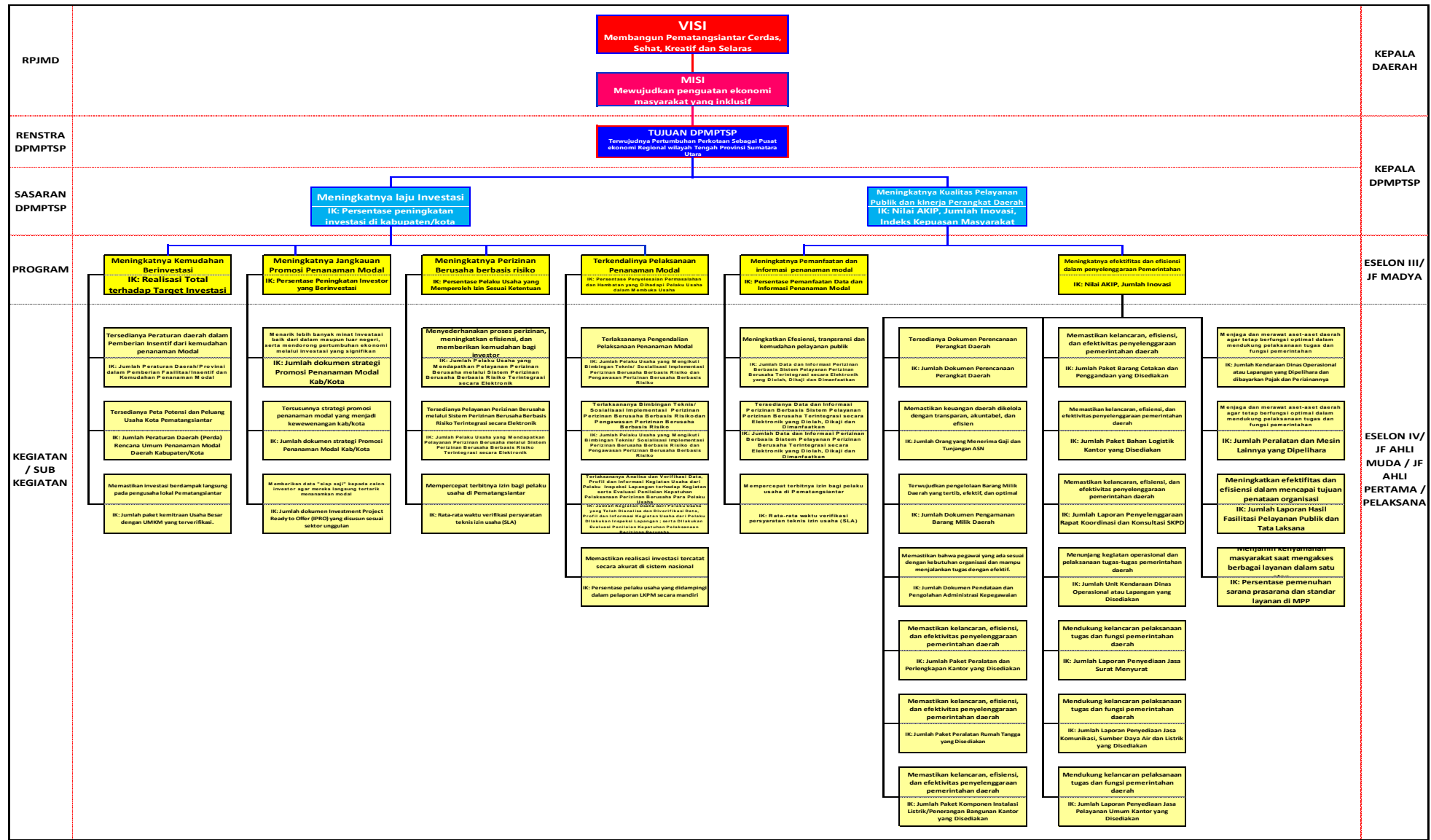
Penyusunan Pohon Kinerja DPMPTSP Kota Pematangsiantar periode 2025-2029 menggunakan pendekatan **Logic Model** atau kerangka logis sebab-akibat (*Cause-and-Effect Relationship*). Prinsip utama yang digunakan adalah logika "**Jika-Maka**":

- **JIKA** kegiatan dan output di level bawah (pelaksana) tercapai dengan baik, **MAKA** sasaran di level atasnya (manajerial) akan terwujud secara otomatis.
- Pendekatan ini memastikan tidak ada aktivitas atau anggaran yang terbuang percuma tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap target organisasi.

#### 3.2. Visualisasi Pohon Kinerja DPMPTSP

Berikut adalah visualisasi struktur penjenjangan kinerja (*cascading*) DPMPTSP Kota Pematangsiantar yang memetakan hubungan dari level strategis (Visi/Misi) hingga ke level operasional (Kegiatan/Sub-Kegiatan):

Gambar 3.1. Pohon Kinerja (Performance Tree) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar Periode 2025-2029



### 3.3. Analisis Alur Logika Strategis

Berdasarkan bagan di atas, arsitektur kinerja DPMPSTSP dibagi menjadi dua pilar utama yang saling mendukung:

#### 1. Alur Peningkatan Laju Investasi (Sisi Kiri)

Untuk mewujudkan peningkatan investasi di Kota Pematangsiantar, dilakukan penjabaran melalui tiga fokus utama:

- **Kemudahan Berinvestasi & Peta Potensi:** Dilakukan melalui penyusunan dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO). Logikanya, investor memerlukan data peluang yang matang dan valid sebelum menanamkan modal.
- **Promosi dan Kemitraan:** Fokus pada perluasan jangkauan pasar dan penciptaan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM lokal. Hal ini bertujuan agar investasi yang masuk bersifat inklusif dan menggerakkan ekonomi rakyat.
- **Pengendalian dan Pengawasan:** Dilakukan melalui pemantauan kepatuhan laporan LKPM. Hal ini memastikan setiap komitmen investasi benar-benar terealisasi di lapangan.

#### 2. Alur Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas (Sisi Kanan)

Sebagai unit pelayanan, efektivitas organisasi ditentukan oleh dua hal:

- **Pelayanan Publik (Eksternal):** Melalui penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Pelayanan yang cepat dan terintegrasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.
- **Akuntabilitas Perangkat Daerah (Internal):** Mencakup penataan administrasi perencanaan, pengelolaan aset, keuangan, dan kepegawaian. Administrasi internal yang tertib adalah fondasi utama agar pelayanan eksternal dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.

### 3.4. Penjenjangan Kinerja (Cascading)

Struktur ini secara otomatis membagi tanggung jawab kinerja berdasarkan jenjang jabatan:

- **Kepala Dinas:** Bertanggung jawab pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis (Outcome).
- **Kepala Bidang (Eselon III):** Bertanggung jawab pada pencapaian Program dan Indikator Kinerja Program (Output).
- **Subkoordinator/Staf Pelaksana:** Bertanggung jawab pada ketuntasan Kegiatan dan Sub-Kegiatan sebagai pendukung utama output organisasi.

## **BAB IV**

### **MATRIKS CASCADING DAN TARGET**

#### **4.1. Penjenjangan Kinerja (Cascading) 2025-2029**

Penjenjangan kinerja (*cascading*) merupakan proses penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja dari level organisasi yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan (*alignment*) antara visi Wali Kota dengan aktivitas harian seluruh aparatur di lingkungan DPMPTSP Kota Pematangsiantar.

#### **4.2. Matriks Target Kinerja Lima Tahunan**

Matriks ini merupakan janji kinerja jangka menengah DPMPTSP yang merinci target tahunan mulai dari tahun 2025 hingga 2029. Matriks ini juga mengidentifikasi dukungan lintas sektor (*cross-cutting*) yang diperlukan dari OPD mitra.

:

Tabel 4.1. Matriks Pohon Kinerja & Cascading DPMPSTSP Kota Pematangsiantar

No.	Level Kinerja	Sasaran Strategis / Kondisi Antara	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline (2024)	Penanggung Jawab (Lead)	OPD Mitra (Cross-Cutting)	Target				
								2025	2026	2027	2028	2029
1	Visi	Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	81,17 (Data BPS)	Wali Kota	Seluruh OPD	82,80 - 82,30	84,10 - 83,65	85,40 - 85,00	86,75 - 86,40	88,10 - 87,80
1.1	Misi	Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,61 (Data BPS)	Wali Kota	Bappeda, Dinas KUKM	4,75	5,10-5,20	5,50-5,75	6,00-6,30	6,5-6,9
2	Tujuan	Terwujudnya Pertumbuhan Perkotaan Sebagai Pusat Ekonomi Regional	Kontribusi Sektor Jasa & Perdagangan terhadap PDRB	%	1,51 (Data BPS)	Kepala DPMPSTSP	Bappeda	1,50	1,50	1,50	1,51	1,51
2.1	Sasaran 1 (Outcome)	Meningkatnya Laju Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Realisasi Investasi (PMDN & PMA)	% (Miliar Rp.)	38.871.087.400	Koord Penata Kelola Penanaman Modal	Dinas PUPR	5 40.814.641.770	5 42.855.373.859	5 44.998.142.551	5 47.248.049.679	5 49.610.452.163
2.1.1	Kondisi Antara	Meningkatnya Promosi Potensi Investasi	Jumlah Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM Lokal	Paket	NA	Subkoor Promosi	Dinas KUKM	0	1	2	3	4
2.1.2	Kondisi Antara	Tersedianya Data Peluang Investasi Siap Jual	Jumlah Dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer)	Dokumen	1	Subkoor Pengembangan	Bappeda	1	1	1	1	1
2.1.3	Kondisi Antara	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	%	100	Subkoor Pengawasan	-	100	100	100	100	100
2.2	Sasaran 2 (Outcome)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,93	Koord Penata Perizinan	Bagian Organisasi	94,00	94,39	94,4	94,41	94,42
2.2.1	Kondisi Antara	Terwujudnya Integrasi Layanan Publik	Jumlah Instansi yang Bergabung di Mal Pelayanan Publik	Instansi	19	Subkoor MPP	Seluruh Instansi	19	19	19	19	19
2.2.2	Kondisi Antara	Optimalisasi Sistem Perizinan Berbasis Risiko	Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu (SLA)	%	100	Subkoor Perizinan	Dinas Teknis	100	100	100	100	100
2.3	Sasaran 3 (Outcome)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPMPSTSP	Predikat	69,43	Sekretaris Dinas	Inspektorat, Bagian Organisasi	70,74	72,5	74,6	76,3	78,4

### 4.3. Matriks Penjenjangan Kinerja Individu (Level Staf/Pelaksana)

Untuk memastikan target strategis di atas tercapai, dilakukan penurunan indikator ke level individu. Matriks ini menghubungkan Sasaran Bidang dengan **Indikator Kinerja Individu (IKI)** serta **Deskripsi Pekerjaan Harian** staf pelaksana.

Tabel 4.2. Matriks Indikator Kinerja Individu (IKI) Pelaksana – DPMPTSP

No	Sasaran (Level Kabid/Subkoor)	Indikator Kinerja Individu (IKI) - Level Staf	Satuan	Deskripsi Pekerjaan Harian (Aktivitas)
1	Meningkatnya Promosi Potensi Investasi	Jumlah materi promosi digital/cetak yang diproduksi	Konten	Membuat brosur, video profil investasi, dan update konten media sosial.
2	Tersedianya Data Peluang Investasi (IPRO)	Jumlah database profil proyek investasi yang tervalidasi	Data	Melakukan survei lapangan dan verifikasi data lahan/potensi ke dinas terkait.
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pendampingan LKPM	Pelaku Usaha	Melakukan <i>coaching clinic</i> atau jemput bola membantu pengisian laporan LKPM.
4	Terwujudnya Integrasi Layanan (MPP)	Persentase keluhan layanan yang diselesaikan tepat waktu	%	Menangani pengaduan masyarakat dan memastikan fasilitas MPP berfungsi baik.
5	Optimalisasi Sistem Perizinan (OSS)	Jumlah berkas permohonan yang diverifikasi secara teknis	Berkas	Memeriksa kesesuaian dokumen permohonan izin yang masuk melalui sistem OSS.
6	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan operasional	Hari	Mengumpulkan data capaian kinerja dari setiap bidang untuk laporan bulanan/triwulan.

### 4.4. Analisis Lintas Sektor (Cross-Cutting)

Pencapaian target DPMPTSP melibatkan kolaborasi aktif dengan OPD mitra sebagai berikut:

1. **Dinas PUPR:** Dukungan validasi tata ruang (RDTR/KKPR) sebagai prasyarat perizinan.
2. **Bappeda:** Sinkronisasi perencanaan investasi dengan dokumen rencana pembangunan daerah.
3. **Dinas KUKM & Perdagangan:** Penyediaan data UMKM lokal untuk program kemitraan investasi besar.
4. **Diskominfo:** Penjaminan stabilitas jaringan internet dan integrasi data pada Mal Pelayanan Publik (MPP).

### 4.5. Strategi Pencapaian Target 5 Tahunan

- **Tahun 2025-2026 (Fase Penataan):** Fokus pada penguatan regulasi, SOP, dan penyediaan dokumen IPRO.
- **Tahun 2027-2028 (Fase Akselerasi):** Fokus pada promosi agresif dan digitalisasi penuh layanan perizinan.
- **Tahun 2029 (Fase Pemanjangan):** Fokus pada evaluasi dampak investasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan predikat SAKIP tertinggi.

## **BAB V**

### **MANUAL INDIKATOR KINERJA**

#### **5.1. Maksud dan Tujuan Manual Indikator**

Manual Indikator Kinerja disusun untuk memberikan panduan teknis bagi setiap unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Pematangsiantar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Hal ini bertujuan untuk menjamin validitas, objektivitas, dan konsistensi data capaian kinerja selama periode Renstra 2025-2029.

#### **5.2. Definisi Operasional dan Formula Penghitungan**

Berikut adalah penjelasan teknis untuk indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP:

##### **1. Realisasi Investasi (PMDN & PMA)**

- Definisi: Akumulasi nilai investasi yang benar-benar telah dilaksanakan oleh pelaku usaha di wilayah Kota Pematangsiantar.
- Satuan: Miliar Rupiah.
- Formula:  $\sum$   
Nilai Investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Sumber Data: Dashboard Sistem OSS-RBA dan Laporan Bidang Penanaman Modal.
- Penanggung Jawab: Bidang Penanaman Modal.

##### **2. Jumlah Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM**

- Definisi: Jumlah paket kerja sama formal antara investor skala besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal.
- Satuan: Paket.
- Formula: Jumlah kontrak kerja sama atau MoU kemitraan yang tervalidasi.
- Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Bidang Penanaman Modal.
- Penanggung Jawab: Bidang Penanaman Modal.

##### **3. Jumlah Dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*)**

- Definisi: Dokumen profil peluang investasi yang sudah melalui kajian teknis, ekonomi, dan hukum sehingga siap ditawarkan kepada investor.
- Satuan: Dokumen.
- Formula: Akumulasi jumlah naskah IPRO yang telah selesai disusun dan disahkan.

- Sumber Data: Laporan Akhir Kajian Bidang Penanaman Modal.
- Penanggung Jawab: Bidang Penanaman Modal.

#### 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Definisi: Ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan.
- Satuan: Nilai (Skala 1-100).
- Formula: Sesuai Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- Sumber Data: Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahunan.
- Penanggung Jawab: Bidang Perizinan / Mal Pelayanan Publik.

#### 5. Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu (SLA)

- Definisi: Rasio jumlah perizinan yang diterbitkan dalam rentang waktu yang sesuai dengan ketentuan standar pelayanan (*Service Level Agreement*).
- Satuan: Persentase (%).
- Formula:  $\left( \frac{\text{Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Izin yang Masuk}} \right) \times 100\%$
- Sumber Data: Laporan Rekapitulasi Izin Sistem OSS-RBA.
- Penanggung Jawab: Bidang Perizinan.

#### 6. Nilai SAKIP DPMPTSP

- Definisi: Nilai akuntabilitas kinerja internal berdasarkan evaluasi sistematis terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
- Satuan: Nilai/Predikat (B/BB/A/AA).
- Formula: Hasil penilaian mandiri dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah.
- Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP.
- Penanggung Jawab: Sekretariat DPMPTSP.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Dokumen Pohon Kinerja dan Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar periode 2025-2029 merupakan instrumen strategis yang menjamin terciptanya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. Dengan adanya penjenjangan yang jelas dari level Kepala Dinas hingga staf pelaksana, setiap aparatur kini memiliki panduan yang terukur dalam memberikan kontribusi nyata bagi organisasi.

Penyusunan dokumen ini telah memenuhi prinsip **Logic Model** dan **SMART**, yang memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan (melalui prinsip *money follows program*) benar-benar berorientasi pada hasil (*result-oriented*) demi mewujudkan Pematangsiantar sebagai pusat ekonomi regional yang kompetitif.

#### 6.2. Harapan dan Komitmen

Keberhasilan implementasi pohon kinerja ini sangat bergantung pada dua faktor utama:

1. **Komitmen Internal:** Kesungguhan seluruh jajaran DPMPTSP dalam memantau, mengevaluasi, dan melaporkan capaian kinerja secara berkala dan akuntabel.
2. **Sinergi Eksternal:** Dukungan kolaboratif dari OPD mitra (Dinas PUPR, Bappeda, Diskominfo, dan lainnya) dalam menyelesaikan isu-isu lintas sektor (*cross-cutting*) yang menjadi prasyarat investasi.

Dokumen ini bersifat dinamis dan akan terus ditinjau serta dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional, kebijakan daerah, maupun dinamika investasi di Kota Pematangsiantar. Dengan semangat kebersamaan, DPMPTSP berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi Wali Kota: "**Membangun Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.**"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR,



**MUHAMMAD HAMMAM SHOLEH, AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730228 199402 1 002